



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
2020**

**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  
KOTA YOGYAKARTA  
2020**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Renja SKPD untuk tahun 2020.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra SKPD sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun berikutnya.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renja SKPD, guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta melanjutkan visi pembangunan Kota Yogyakarta yang mendasarkan pada pasal 4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 bahwa

Pembangunan Kota diarahkan dengan visi, yaitu menjadikan "Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan".

Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020 mengakomodir program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan tahun 2020 diarahkan pada tema: : **“Peningkatan Daya Saing sebagai Pusat Pelayanan Jasa untuk Masyarakat Berdaya dan Berbudaya”**, maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan dan mengampu pekerjaan dari sebagian kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam **sasaran pembangunan di Kota Yogyakarta**, sebagai berikut :

1. Kemiskinan masyarakat menurun
2. Keberdayaan masyarakat meningkat
3. Ketahanan pangan masyarakat meningkat
4. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
5. Pertumbuhan ekonomi meningkat
6. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
7. Kualitas pendidikan meningkat
8. Harapan hidup masyarakat meningkat
9. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
10. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
11. Kualitas lingkungan hidup meningkat
12. Infrastruktur wilayah meningkat
13. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

## 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11) ;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan RenjaDinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2020 ini adalah sebagai panduan dalam perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2020.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Renja SKPD ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada dalam Renja ke dalam KUA dan PPAS Tahun 2020.

### **1.4 Sistematika**

Sistematika Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2020, sebagaimana dimaksud terdiri dari :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Berisi pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, proses penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, keterkaitan antara Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dengan dokumen lainnya, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang peraturan – peraturan yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

##### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, serta garis besar isi dokumen

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian tentang proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta alasannya dan penjelasan apabila terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat hasil telaah terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

#### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Berisi hasil perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisi uraian mengenai faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program dan kegiatan, lokasi dan kebutuhan dana indikatif, serta uraian penjelasan yang diperlukan apabila program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan output dan outcome yang diinginkan.

### BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting, yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah. (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan terlampir dalam Tabel 2.1)

## **Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Analisis Kinerja Pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mulai tahun 2017 didasarkan pada Renstra 2017-2022 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah sesuai tabel berikut.

## 2.2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang kemungkinan disebabkan karena selama ini belum tersedianya kelembagaan formal yang khusus menangani tata ruang sehingga masih ada tumpang tindih kewenangan antar instansi, atau sebaliknya ada sektor yang justru dibiarkan atau tidak tersentuh sama sekali karena ketidakjelasan instansi mana yang diharapkan bertanggungjawab. Instansi yang secara khusus bertanggungjawab menangani tata ruang belum ada, sementara saat ini dengan perkembangan kota yang cukup cepat banyak terjadi alih fungsi lahan. Hal ini jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan perkotaan di masa datang, perkembangan kota akan menjadi tidak tertata dan tidak terkendali, tidak nyaman untuk berkehidupan. Sementara sebagai sebuah kota diharapkan (1) kelestarian lingkungan kota yang berkelanjutan dapat terjaga, (2) sarana prasarana perkotaan memadai, (3) kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta (4) standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan meningkat. Selain itu (5) **pengendalian pemanfaatan ruang** yang kurang optimal diindikasikan dari (6) rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai, (7) kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat dan rendah atau kurangnya fungsi lindung kawasan sempadan sungai.

Disisi lain permasalahan dan Isu Strategis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, meliputi :

- a. kelestarian lingkungan kota yang berkelanjutan kurang dapat terjaga,
- b. sarana prasarana perkotaan kurang memadai,
- c. kelancaran perhubungan dan lalu lintas,
- d. standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan meningkat
- e. rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai,
- f. kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat

Fungsi Penataan Ruang berdasarkan PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi :

### 1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

- a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau publik dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota.

- b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau privat dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota.
- c. Apabila luas ruang terbuka hijau, memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

**2. Pengaturan penataan ruang diselenggarakan untuk:**

- a. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- c. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang.

**3. Pembinaan penataan ruang diselenggarakan untuk:**

- a. meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang;
- b. meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- c. meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- d. meningkatkan kualitas struktur ruang dan pola ruang.

**4. Pelaksanaan pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk:**

- a. mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang direncanakan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat secara berkualitas; dan
- b. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan dilaksanakan secara terpadu.

**5. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk :**

- a. menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
- b. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui:
  - 1) pengaturan zonasi;
  - 2) perizinan;
  - 3) pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - 4) pengenaan sanksi.

**6. Pengawasan penataan ruang diselenggarakan untuk:**

- a. menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang;
- b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang;  
dan
- c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dengan partisipasi dari berbagai pihak pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi daerah yang ada. Kondisi umum daerah secara makro yang diinginkan atau diproyeksikan ke depan pada akhir Pembangunan Jangka Menengah yaitu pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	81,97
2.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	100

**2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dengan partisipasi berbagai pihak, pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi tata ruang yang diinginkan sebagai Sasaran Pembangunan Daerah :

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang.	73,40%

Proses pelaksanaan peningkatan sarana prasarana pada akhir Renstra diharapkan dapat memperbaiki kondisi tata ruang secara optimal, termasuk penyusunan hubungan input, proses dengan output/outcomes.

Perbandingan antara RKPD 2018 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dapat disajikan sebagaimana **Tabel 2.3** berikut:

**Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Program Pengelolaan Pertanahan/ Pemanfaatan Pertanahan</b>	Kel. Suryatmajan	Pengadaan tanah pembangunan kantor	1 bidang	
		Kel. Pakuncen	Pengadaan tanah sarana umum taman. (RTHP)	1 bidang	
		Kel. Pandeyan	Pengadaan tanah sarana umum taman. (RTHP)	1 bidang	
		Kel. Warungboto	Pengadaan tanah sarana umum taman. (RTHP)	3 bidang	
		Kel. Sorosutan	Pengadaan tanah sarana umum taman. (RTHP)	1 bidang	
		Kel. Purbayan	Pengadaan tanah sarana umum taman. (RTHP)	1 bidang	
		Kel. Ngampilan	Pengadaan tanah sarana umum taman. (RTHP)	1 bidang	
		Kel. Wirogunan	Pengadaan tanah sarana umum taman. (RTHP)	1 bidang	
		Kel. Gedongkiwo	Pengadaan Tanah Lain	1 bidang	Gedung Serbaguna
		Kel. Patangpuluhan	Pengadaan Tanah Lain	1 bidang	Gedung Serbaguna
		Kel. Gowongan	Pengadaan Tanah Lain	1 bidang	Gedung Serbaguna

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2019 telah melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, tetapi selaku SKPD yang memberikan pelayanan kepada SKPD tidak hanya menampung hasil Musrenbang Kecamatan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Beberapa kebijakan nasional dalam pengimplementasiannya di daerah tidak hanya terkait dukungan dan ketepatan terhadap prioritas sasaran, namun termasuk sumber daya, tenaga, sarana prasarana yang mencukupi. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, sesuai Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwal) yang mengaturnya, berkewajiban dan masuk dalam mata rantai agar kebijakan nasional dan kebijakan regional Daerah Istimewa Yogyakarta dapat tercapai dengan baik.

Urusan Tata Ruang diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 yang merupakan amanah otonomi daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang. Di lain pihak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan memberikan amanah dalam dua bidang yang diampu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yaitu Pertanahan dan Penataan Ruang. Hal ini membutuhkan pemenuhan sarana prasarana kerja dalam produktifitas kerja, sumber daya aparat pemerintahan sangatlah penting pengaruh dan perannya dalam pencapaiannya.

Pada akhirnya kebijakan nasional dapat tercapai apabila didukung oleh kebijakan dan pelaksanaan pada tingkat regional dan lokal yang baik, terstruktur dan sistematis.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.**

##### **3.2.1 Tujuan**

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah :

1. Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
2. Meningkatkan Tertib administrasi pertanahan.

##### **3.2.2 Sasaran**

Sedangkan sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah :

1. Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.
2. Tertib administrasi pertanahan meningkat

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### 3.3.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yaitu:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	70,58
2.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	96,86

#### 3.3.2 Rencana Kinerja Tahunan 2020

Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah khususnya prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola disusun Rencana Kinerja Tahunan 2020 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	70,58
2.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	96,86

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta merencanakan program dan kegiatan tahun 2020. Program kegiatan dimaksud terdiri dari 3 program.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah memuat nama Urusan, Program dan Sasaran Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2020. Penetapan indikator kinerja dan target mengacu pada Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 disajikan pada Tabel 4.1

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Visi dan Misi Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020.

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitas pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2020, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terakomodasi, terintergrasi dan bersinergi serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Yogyakarta, 2019

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  
Kota Yogyakarta

Ir. Hari Setyowacono, MT.  
NIP. 19640126 199303 1 005

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019**  
**Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta										
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018(TW IV)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%		100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%		100%	100%	100%	100%		
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%		100%	100%	100%	100%		
4.	Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	72.00%		61.40%	61.40%	100%	72.00%		
5.	Program Pengendalian Tata Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	56.50%		50.25%	50.25%	100%	56.50%		
6.	Program Pengelolaan Pertanahan	Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot.	94.82%		91.80%	91.80%	100%	94.82%		
		Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan.	95.20%		93.60%	93.60%	100%	95.20%		

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>I</b>	<b>Indikator Sasaran :</b>														
1	Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang.			47.9	55.83	64.25	70.58	77.25	81.97	47.9	55.83				
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan			30.07	92.41	94.95	96.86	98.77	100	30.07	92.41				
<b>II</b>	<b>Indikator Program :</b>														
1	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang			52.30%	61.40%	72.00%	79.40%	86.50%	88.48%	52.30%	61.40%				
2	Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang			43.50%	50.25%	56.50%	61.75%	68.00%	75.45%	43.50%	50.25%				
3	Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot.			29.40%	91.80%	94.82%	96.89%	98.96%	100%	29.40%	91.80%				
4	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan.			31.38%	93.60%	95.20%	96.80%	98.40%	100%	31.38%	93.60%				

Tabel 2.3  
Review terhadap Rancangan Awal Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</b>	100%	607,093,940	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</b>	100%	607,093,940	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	218,700,000	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	218,700,000	
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	388,393,940	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	388,393,940	
2	<b>Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	100%	212,548,000	<b>Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	100%	212,548,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	65,388,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	65,388,000	
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	147,160,000	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	147,160,000	
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan</b>	100%	70,897,240	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan</b>	100%	70,897,240	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	70,897,240	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	70,897,240	
4	<b>Program Pengelolaan Pertanahan</b>		<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD</b>	B		<b>Program Pengelolaan Pertanahan</b>		<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD</b>	B		
			<b>Persentase persertifikatan tanah aset pemkot</b>	96.89%	70,598,683,685	<b>Program Pengelolaan Pertanahan</b>		<b>Persentase persertifikatan tanah aset pemkot</b>	96.89%	70,598,683,685	
			<b>Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan.</b>	96.80%				<b>Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan.</b>	96.80%		
4.1	Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Persentase aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta.	70%	185,459,825	Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Persentase aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta.	70%	185,459,825	
			<b>Persentase pengurusan peta bidang tanah untuk fasum jalan kampung di wilayah Kota Yk.</b>	30%				<b>Persentase pengurusan peta bidang tanah untuk fasum jalan kampung di wilayah Kota Yk.</b>	100%		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase perpanjangan/ permohonan baru Pemkot Yk untuk Pinjam pakai tanah milik Sri Sultan HB Kraton Ngayogyakarta hadiningrat.	30%				Persentase perpanjangan/ permohonan baru Pemkot Yk untuk Pinjam pakai tanah milik Sri Sultan HB Kraton Ngayogyakarta hadiningrat.	100%		
			Pelacakan dan identifikasi tanah se Kota Yk yang belum jelas haknya baik tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah Pemkot Yk.	20%				Pelacakan dan identifikasi tanah se Kota Yk yang belum jelas haknya baik tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah Pemkot Yk.	100%		
4.2	Pemanfaatan Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Bertambahnya aset/fasilitas publik milik pemkot Yogyakarta	7 lokasi	70,252,095,240	Pemanfaatan Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Bertambahnya aset/fasilitas publik milik pemkot Yogyakarta	8 lokasi	70,252,095,240	
			Persentase permohonan rekomendasi yang dapat diselesaikan	100%				Persentase permohonan rekomendasi yang dapat diselesaikan	100%		
4.3	Penyelesaian Masalah Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Kejelasan status pertanahan	1 dokumen	161,128,620	Penyelesaian Masalah Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Kejelasan status pertanahan	1 dokumen	161,128,620	
5	<b>Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.</b>		<b>Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.</b>	<b>79.40%</b>	<b>1,735,145,860</b>	<b>Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.</b>		<b>Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.</b>	<b>79.40%</b>	<b>1,735,145,860</b>	
5.1	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Tersedianya Draft Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.	1 dokumen	1,108,278,620	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Tersedianya Draft Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.	1 dokumen	1,108,278,620	
5.2	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatnya pengaturan tata bangunan dan tata lingkungan perkotaan.	2 dokumen	392,998,620	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatnya Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan Perkotaan.	2 dokumen	392,998,620	
5.3	Pembinaan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatnya pemahaman dan akses informasi penataan ruang Kota Yogyakarta.	14 kecamatan	233,868,620	Pembinaan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatnya pemahaman dan akses informasi penataan ruang Kota Yogyakarta.	14 kecamatan	233,868,620	
6	<b>Program Pengendalian Tata Ruang</b>		<b>Persentase Penilaian Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Tata Ruang.</b>	<b>61.75%</b>	<b>1,101,763,260</b>	<b>Program Pengendalian Tata Ruang</b>		<b>Persentase Penilaian Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Tata Ruang.</b>	<b>61.75%</b>	<b>1,101,763,260</b>	
6.1	Pengendalian Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Tersedianya data rinci pemanfaatan ruang kota Yogyakarta dan kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah	2 dokumen	306,934,620	Pengendalian Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Tersedianya data rinci pemanfaatan ruang kota Yogyakarta dan kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah	2 dokumen	306,934,620	
6.2	Pengawasan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian penyelenggaraan Penataan Ruang yang tertib dan berkelanjutan.	5 dokumen	422,000,020	Pengawasan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian penyelenggaraan Penataan Ruang yang tertib dan berkelanjutan.	5 dokumen	422,000,020	
6.3	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Terpenuhinya kebutuhan informasi tata ruang.	3 dokumen	372,828,620	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Terpenuhinya kebutuhan informasi tata ruang.	2 dokumen	372,828,620	
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>74,326,131,985</b>	<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>74,326,131,985</b>	

Tabel 4.1  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

No Urut	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Tertib administrasi pertanahan meningkat.		Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran.	100%						716,965,330	788,661,863		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Makan dan minum pegawai	37 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran.	100%	218,700,000	240,570,000	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.	
							Makan dan minum koordinasi	121 kali							
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	18 laporan							
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Meterai 3000	300 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional kantor.	100%	388,393,940	427,233,334	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	
							Meterai 6000	400 buah							
							STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang terbayar	20 unit							
							Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan							
							Alat Tulis Kantor	69 jenis							
							Bahan Komputer/Printer	5 jenis							
							Jasa Telepon	12 bulan							
							Surat kabar	2 jenis							
							Buku Giro	3 buah							
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	8 jenis							
							KIR Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit							
							Jasa Percetakan	15 jenis							
							Jasa Penggandaan	110.000 lembar							
							Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	10 jenis							
							Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia.	4 jenis							
							Bahan bacaan/peraturan perundangan.	10 buah							
							Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	38 Dokumen ASN							
							Jasa Pengelola Arsip	1 orang							
							Jasa Tenaga Bantuan	3 orang							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Tertib administrasi pertanahan meningkat.		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai.	100%						212,548,000	233,802,800		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 lokasi	Dukungan terhadap peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	65,388,000	71,926,800	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.	17 unit			147,160,000	161,876,000	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Tertib administrasi pertanahan meningkat.		Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan.	100%						70,897,240	77,986,964		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran (Renstra, Renja, RK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu.	100%	70,897,240	77,986,964	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	
							Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fiskal, SKM, SPP, Prof II)	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	B					
							Dokumen administrasi keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi	4 jenis							
4	Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat.		Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.	72.00%						1,735,145,860	2,116,576,539		
4.1	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Rinyempurnaan Rancangan Perda RTRW	1 dokumen	Tersedianya draft revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.	1 dokumen	1,108,278,620	1,219,106,482	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	
							Analisis Amdal Kawasan	1 dokumen							
							Dokumen Petunjuk Pelaksanaan	1 dokumen							
4.2	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan (RTBL)	1 dokumen	Meningkatnya pengaturan tata bangunan dan tata lingkungan perkotaan.	2 dokumen	392,998,620	432,298,482	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	
							Draft Perwal RTBL	3 dokumen							

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
4.3	Pembinaan Tata Ruang			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Laporan latsah/Surat Keterangan Rencana Kota.	1 dokumen	Meningkatnya pemahaman dan akses informasi penataan ruang Kota Yogyakarta.	14 Kecamatan	233,868,620	257,255,482	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	
							Diseminas Peraturan Tata Ruang Kota Yogyakarta	1 dokumen							
							Kajian Pengembangan Kaw asan Simpul Jaringan Transportasi/ Transit Oriented Development (TOD)	1 dokumen							
							Kajian Potensi Pengembangan Kaw asan Pedestrian Kota Yogyakarta	1 dokumen							
							Kajian Fungsi Ruang pada Zona Perdagangan dan Jasa di Kota Yogyakarta	1 dokumen							
5	Program Pengendalian Tata Ruang	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat.		Persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang.	56.50%					1,006,296,940	1,106,926,634			
5.1	Pengendalian Tata Ruang			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan.	1 dokumen	Tersedianya data rinci pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta dan kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah.	2 dokumen	221,241,140	243,365,254	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	
							Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.	1 dokumen							
5.2	Pengawasan Tata Ruang						Laporan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan tata ruang (Turbinlaw as)	1 dokumen	Meningkatnya kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang yang tertib dab berkelanjutan.	5 dokumen	304,422,400	334,864,640	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	
							Laporan Sandar Pelayanan Minimal (SPM) Penataan Ruang	1 dokumen							
							Laporan Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang.	1 dokumen							
							Neraca Penatagunaan Air	1 dokumen							
							Kajian Perangkat Pengendalian Penataan Ruang.	1 dokumen							
5.3	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Pengembangan dan updating sistem informasi tata ruang (SITARLU)	1 dokumen	Terperuhnya kebutuhan informasi tata ruang.	3 dokumen	480,633,400	528,696,740	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	
							Pengembangan dan updating sistem informasi pertanahan (SIFERTA)	1 dokumen							
							Pembuatan Peta Sebaran Bangunan berbasis GIS	1 dokumen							
							Pembuatan Profil Tata Ruang Kota	1 dokumen							
					Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Pertanahan.	95.20%									
6	Program Pengelolaan Pertanahan	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Tertib administrasi pertanahan meningkat.		Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot.	94.82%					18,029,493,400	19,832,442,740			
6.1	Inventarisasi dan identifikasi Pertanahan			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Terdafarnya Pensertifikatan aset tanah milik Pemkot Yogyakarta.	20 bidang	Persentase Aset pemkot Yogyakarta yang sudah disertifikatkan atas nama Pemkot Yogyakarta.	70%	173,986,800	191,385,480	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	
							Terdafarnya Permohonan Pembuatan/Perubahan Peta Bidang untuk Fasum	7 bidang	Persentase Pengurusan Peta Bidang tanah untuk Fasum jalan kampung di wilayah Kota Yk	30%					
							Pengurusan Permohonan Baru/Perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan HB Kraton Ngayogyakarta hadiningrat.	10 bidang	Persentase Perpanjangan / Permohonan Baru Pemkot Yk untuk Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan HB Kraton Ngayogyakarta hadiningrat.	30%					
							Pelacakan dan identifikasi tanah se Kota Yogyakarta yang belum jelas alas haknya baik tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah Pemkot Yogyakarta.	1 dokumen	Pelacakan dan identifikasi tanah se Kota Yogyakarta yang belum jelas alas haknya baik tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah Pemkot Yogyakarta.	20%					
6.2	Pemanfaatan Pertanahan			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Pengadaan Tanah Kantor	1 lokasi	Bertambahnya aset/fasilitas publik milik Pemkot Yogyakarta.	11 lokasi	17,821,806,600	19,603,987,260	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	
							Pengadaan Tanah untuk RTHP	7 lokasi	Persentase permohonan rekomendasi yang dapat diselesaikan.	100%					
							Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum.	3 lokasi							
							Penyelesaian Permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah negara.	1 dokumen							
6.3	Penyelesaian Masalah Pertanahan			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta			Penyelesaian Masalah Pertanahan	1 dokumen	Kejelasan status tanah.	1 dokumen	33,700,000	37,070,000	Lanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	
<b>Total</b>											<b>22,104,150,960</b>	<b>24,314,566,056</b>			